GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN

Surat Kabar	**: Kompas**	**Tanggal**	**: 1 Februari 2007**
Subyek	**: Kerusakan Hutan**	**Hari**	**: kamis**
		Halaman	**: 23**

Hutan

Parah, Kerusakan di Lereng Gunung Slamet

Purwokerto, Kompas - Hutan lereng Gunung Slamet di empat wilayah kabupaten, yakni Banyumas, Purbalingga, Pemalang, dan Brebes, Jawa Tengah, berpotensi kritis. Penyebabnya antara lain adalah alih fungsi hutan untuk lahan pertanian, permukiman, dan penebangan ilegal, serta kurangnya tegakan kayu atau tanaman keras.

Dari pemetaan oleh Institut Pertanian Bogor terlihat, dari 19.833 hektar lahan kritis di kawasan hutan Gunung Slamet, sebagian besar ada di Banyumas.

Menurut Wisnu Hermawanto, Kepala Dinas Kehutanan Banyumas, Rabu (31/1), Banyumas memiliki hutan negara seluas 26,873 hektar lebih dan hutan rakyat lebih kurang 12.402 hektar. Sekitar 19.883 hektar lebih berada dalam kondisi kritis.

Idealnya, setiap hektar tanah terdapat 300-400 tegakan. Kenyataannya, tegakan hutan di Gunung Slamet sekitar 200, malah hanya 100 tegakan. Mengingat pentingnya peran kawasan hutan Gunung Slamet, menurut dia, sebaiknya hutan di gunung ini dijadikan hutan lindung dan hutan konservasi.

"Jika dijadikan hutan produksi, berpotensi menimbulkan bencana tanah longsor atau gerakan tanah yang akan merusak lingkungan serta sumber-sumber air," ujar Wisnu.

Dalam kesempatan terpisah, Bupati Purbalingga Triyono Budi Sasongko di sela-sela acara Puncak Aksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan, di Desa Cendana, Kecamatan Kutasari, mengungkapkan, dari luas hutan 77.764 hektar terdapat 15.374 hektar atau 19,7 persen yang termasuk kritis.

Melihat kenyataan ini, menurut Triyono, degradasi hutan dan lingkungan hidup mau tidak mau, suka dan tidak suka merupakan masalah harus segera ditanggulangi. Dalam empat tahun terakhir, penanganan kerusakan lingkungan dan lahan kritis di daerahnya diprioritaskan di kawasan subdaerah aliran sungai, menjangkau 5.875 hektar.

Triyono mengingatkan, kerancuan dalam interpretasi gerakan rehabilitasi hutan dan lahan (Gerhan) sebagai proyek. Anggapan ini salah besar. Sebagai gerakan moral, Gerhan harus terus berjalan, ada atau tidaknya bantuan dana dari pemerintah. Rehabilitasi hutan dan lahan merupakan pekerjaan besar yang memerlukan dana besar pula.

"Jika hanya mengandalkan dana pemerintah, dengan kecepatan degradasi yang secara nasional mencapai 2,8 juta hektar, luas hutan yang mengalami degradasi tidak pernah akan berkurang," ujar Triyono. (nts)

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup